

## **Respon Komunitas Suku Asli/Laut menanggapi program-program pendidikan yang di implementasikan oleh pemerintah terkait pendidikan**

Desi Berliana Barus  
(Program Studi Administrasi Negara FISP UMRAH)

### **Abstrak**

*Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana Komunitas Suku Asli/Laut menanggapi program-program pendidikan yang di implementasikan oleh pemerintah terkait pendidikan. Bagaimana dilema partisipasi dan aksesibilitas masyarakat marginal dalam menempuh pendidikan menjadi sasaran dan fokus dalam penelitian ini. Sebagai masyarakat yang memiliki pola pikir terbelakang terhadap definisi pendidikan maka Komunitas Suku Asli/Laut dengan khas sosial budaya (culture) yang berbeda dengan masyarakat modern lain nya membuat Komunitas Suku Asli/Laut menjadi objek yang menarik untuk di kaji oleh banyak pihak. Penulisan ini beranjak dari beberapa alasan dari penulis, pertama pendidikan merupakan jembatan untuk seseorang mampu merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan hal ini sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah adalah instrument yang bertanggungjawab penuh atas penyelenggara kehidupan di negeri ini sehingga tidak ada alasan untuk setiap masyarakat tidak mengecap dunia pendidikan.*

Kata kunci: komunitas, pendidikan, suku laut

### **Pendahuluan**

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana Komunitas Suku Asli/Laut menanggapi program-program pendidikan yang di implementasikan oleh pemerintah terkait pendidikan. Bagaimana dilema partisipasi dan aksesibilitas masyarakat marginal dalam menempuh pendidikan menjadi sasaran dan fokus dalam penelitian ini.

Sebagai masyarakat yang memiliki pola pikir terbelakang terhadap definisi pendidikan maka Komunitas Suku Asli/Laut dengan khas sosial budaya (culture) yang berbeda dengan masyarakat modern lain nya membuat Komunitas Suku Asli/Laut menjadi objek yang menarik untuk di kaji oleh banyak pihak. Penulisan ini beranjak dari beberapa alasan dari penulis, pertama pendidikan merupakan jembatan untuk seseorang mampu merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan hal ini sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertera dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah adalah instrument yang bertanggungjawab penuh atas penyelenggara kehidupan di negeri ini sehingga tidak ada alasan untuk setiap masyarakat tidak mengecap dunia pendidikan.

Kedua, kesadaran Komunitas Suku Asli/Laut tentang dunia pendidikan sangat minim sehingga angka partisipasi dalam pendidikan masih sangat rendah. Penulis berasumsi bahwa rendahnya partisipasi Komunitas Suku Asli/Laut adalah dikarenakan faktor ekonomi, sosial, budaya atau bahkan politik. Beberapa ahli seperti Todaro (1997: 254) dan Simmons (1980:6) melihat bahwa kemiskinan telah membuat ketidakberdayaan mereka yang miskin (Komunitas Suku Asli/Laut) untuk mengikuti sekolah bukan saja karena sekolah memerlukan biaya, tetapi karena mereka kekurangan gizi, sering tidur di kelas dan sulit

menangkap pelajaran dengan akibat berikutnya adalah *drop-out* dari sekolah.

Ketiga, pendidikan untuk semua adalah sebuah konsep dari penulis untuk menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam menempuh pendidikan dan pembelajaran. Penjabaran dari isi UUD 1945 mengenai pendidikan Indonesia cukup jelas bahwa negara menyediakan sarana pendidikan. Maka dari itu pemerataan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran tidak hanya terbatas pada kelompok warga yang mampu, tetapi harus menyeluruh untuk setiap lapisan masyarakat.

Pendidikan yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua tipe yaitu pendidikan Formal dan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomer 20 pasal 26 ayat 1 dan 3 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih maka dari itu pemberantasan buta aksara merupakan tahap awal untuk mencapai pendidikan yang berkualitas di kancah lokal hingga mampu memasuki tahap yang lebih tinggi. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) dalam Kusnadi, dkk (2003:50)

*“program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan dan mengembangkan*

*kemampuan keaksaraan (membaca, menulis dan berhitung) serta keterampilan fungsional yang dibutuhkan terkait dengan kemampuan keaksaraan itu, sehingga dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pengetahuan dasar (basic education) yang dibutuhkan dalam habitat dan komunikasi hidupnya”*

Pemanfaatan merupakan tahap ketiga dalam adanya partisipasi masyarakat di suatu kebijakan. Dalam tahap ini masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Khususnya masyarakat suku asli/laut yang telah ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan selanjutnya partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan menjadi tahap lanjutan dalam suatu partisipasi.

### **Kerangka Teoritik**

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari hasil output yang dicapai dari suatu implementasi kebijakan yang telah dibuat, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Wawancara dengan bapak Ardian menjadi penguat penjelasan di atas, beliau mengatakan:

*“kita sudah sangat bersyukur dengan adanya program inklusif dan lain nya yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat suku asli/laut, karena dengan adanya program itu masyarakat disini kan jadi mengenal dunia pendidikan, orang tuanya dan anak-anak nya sudah jadi lebih peduli dengan pendidikan juga diajarkan mengenal huruf dan sebagainya itu sangat membantu sekali cuman kalau bisa ditambahkan lagi sesuatu yang baru di dalam proses belajar, karena masyarakat suku asli/laut disini memiliki sifat yang cenderung pembosan, jadi harus selalu ada*

*pembaharuan dalam proses mengajar nya juga, mungkin cara belajar dengan seperti nonton bareng lah artinya tidak monoton yang menjelaskan terus-terusan tetapi harus ada sesuatu yang lain yang bisa membuka cara berpikir mereka krena masyarakat disini akan lebih mudah mengerti apabila ada contoh-contoh nya langsung, mungkin pakai layar proyektor atau infocus kan lebih efisien dan efektif dari pada cerita dan ngomong saja berjam-jam itu gak nangkap mereka itu sih kalau bisa supaya masyarakat disini tidak jenuh" (sumber data:wawancara langsung pada tanggal 04 juni 2017)*

Setelah pelaksanaan dari sebuah keputusan yang disepakati diawal selanjutnya hasil merupakan hal yang sangat di harapkan oleh masyarakat suku asli/laut. Adanya hasil yang memang sesuai dengan peruntukan masyarakat sehingga keputusan yang telah di ambil berakhir dengan hasil yang dinikmati masyarakat luas terkhusus masyarakat komunitas suku asli/laut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat suku asli/laut dapat diketahui bahwa masyarakat suku asli/laut sangat mendapat dampak yang positive serta manfaat dari adanya program-program yang di implementasikan di masyarakat suku asli/laut namun ketika program tersebut terhenti dan mengalami masa vakum, masyarakat komunitas suku asli/laut mengalami kejenuhan dalam penantian program lanjutan.

Senada dengan ibu meli, beliau mengatakan:

*"ada manfaat, kami senang dulu ketika belajar itu lancar-lancar saja, kami yang tak tau huruf sama sekali tapi setelah belajar itu kami kan jadi tau juga udah mulai bisa kami membaca dulu sikit-sikit, kenal huruf mana a b c dan sampai bisa membaca, senang hati kan tapi ya gitu sekarang kami udah lupa lagi cara membaca itu bagaimana, dulu aja pas ibu itu mengajar kami,kami membaca belum terlalu lancar tapi sekarang ini sudah lupa lagi Cuma kenal huruf sikit-sikit aja lah,*

*sudah hampir lah dekat setahun tak masuk lagi kalaupun masuk sekali-sekali saja lah dia datang"(sumber data: wawancara pada tanggal 02 juni 2017)*

Dari wawancara yang disampaikan oleh Ibu Meli, dapat diketahui bahwa ilmu harus terus di asah melalui proses belajar mengajar agar semakin meningkat pengetahuan yang di dapat. Masa vakum dari proses belajar mengajar yang sudah terhenti selama kurang lebih dari satu tahun menyebabkan masyarakat komunitas suku asli/laut menjadi lupa akan pelajaran yang pernah mereka terima selama proses belajar mengajar. Kefektifan guru dalam mengajar sangat dibutuhkan dalam mengajar masyarakat komunitas suku/asli laut.

Disampaikan pula oleh ibu sari, beliau mengatakan bagaimana manfaat dari program Inklusif, dalam wawancara yang berdurasi 15 menit beliau mengatakan :

*"kalau ditanya manfaat, dulu iya memang kami ada tambah ilmu untuk membaca dan bisa kenal huruf-huruf juga, tapi kalau sekarang sudah tak ada lagi manfaat itu, udah lupa lagi kami apa-apa saja yang diajarkan oleh mereka dulu, anak ibu ini dulu waktu masih aktif ibu resti itu datang mengajar si ester sudah sering suruh saya belikan dia pensil buku gambar dan alat tulis gitu, ya senanglah hati lihat anak mau belajar, tapi kalau sekarang ini sudah tak ada lagi, makanya ini sudah mau runding juga dengan ibu Rttentang proses belajar yang kadang datang kadang tidak, anak-anak kita disini kan harus bisa membaca juga kan sama dengan anak-anak yang lain supaya bisa pergi kemana-mana nanti tak di tipu orang, kalau ibu ini biarlah kalau tak pandai baca tapi kalau anak ibu janganlah sama dengan nasib orang tua nya"(sumber data: wawancara pada tanggal 03 juni 2017)*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku asli/laut mendapat dampak yang positive dan mendapat perkembangan dalam dunia pendidikan, masyarakat yang awalnya tidak

bisa mengenal huruf, menjadi mengenal huruf bahkan bisa membaca meskipun tidak terlalu lancar. Program-program yang di implementasikan di masyarakat suku asli/laut menjadi senjata untuk menepis angka tingginya pendidikan buta aksara yang ada, Namun program tersebut kini sudah tidak efektif lagi dikarenakan kehadiran guru dalam mengajar tidak stabil dan mengalami masa vakum.

Menurut Sandy Abdullah (2013:10) guru yang baik digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional. Ia terus berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah menjadi tempat yang paling baik bagi anak-anak muda.
- b. Mereka yakin akan nilai atau fakta manfaat pekerjaannya. Mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya.
- c. Mereka tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Mereka secara Psikologi lebih matang sehingga rangsangan-rangsangan terhadap dirinya dapat ditaksir.
- d. Mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari pengamatannya tentang bekerjanya psikologi, biologi, dan antropologi kultural di dalam kelas.
- e. Mereka berkeringetan untuk terus tumbuh. Mereka sadar bahwa di bawah pengaruhnya, sumber-sumber manusia dapat berubah nasibnya.

Sementara itu Leo R.Sandy (Sandy Abdullah 2013:11) menjelaskan 11 karakteristik guru yang efektif yakni sebagai berikut:

1. Menjadi *a learner* (pembelajar)
2. Menjadi *a leader* (pemimpin)
3. Menjadi *a provocateur* (provokator dalam arti yang positif)
4. Menjadi *a stranger* (pengelana)
5. Menjadi *an innovator* (inovator)

6. Menjadi *a comedian/entertainment* (pelawak/penghibur)
7. Menjadi *a coach or guide* (pelatih atau pembimbing)
8. Menjadi *a genuine human being or humanist* (manusia sejati atau seorang manusia)
9. Menjadi *optimist or idealist* (orang yang optimis atau idealis)
10. Menjadi *a collaborator* (kolaborator atau orang yang suka bekerja sama)
11. Menjadi *a revolutionar* (berfikir mau atau revolusioner)

Waktu yang tidak stabil dan proses belajar yang vakum membuat masyarakat suku asli/laut mulai lupa dengan pelajaran yang pernah diberikan oleh tenaga pengajar. Hal ini tentu sangat disayangkan apabila tidak ada proses belajar yang berkelanjutan diterapkan di masyarakat suku asli/laut.

Penulis berharap agar pemerintah lokal Desa Perayun, memperhatikan kekurangan tenaga pengajar yang ada di komunitas suku laut/asli tersebut. Minimnya tenaga pengajar yang ada menjadi faktor kendala terhentinya proses belajar-mengajar yang ada, seharusnya pemerintah lokal atau pemerintahan Desa Perayun bekerjasama dengan pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait mampu menyediakan tenaga pengajar yang efektif.

Pemerintah Desa beserta Pemerintah Daerah juga dapat menyediakan dana dari Desa untuk menghargai jasa guru-guru yang mengajar di komunitas suku asli/laut Desa Perayun sehingga proses belajar di komunitas suku asli/laut dapat terlaksanakan dengan baik tanpa kendala kekurangan tenaga pengajar lagi. Semakin tinggi angka pendidikan dan rendahnya angka buta aksara di suatu daerah maka daerah tersebut akan lebih maju dan dapat segera mencapai masyarakat yang sejahtera.

### 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk

mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi dalam evaluasi dapat digunakan sebagai alat penilaian seberapa besar hasil yang telah dicapai oleh pelaksanaan keputusan tersebut, sehingga selayaknya:

- a. Hasil evaluasi selayaknya mencantumkan dan memberikan hasil dari pencapaian yang telah di peroleh dari masyarakat sehingga hasil evaluasi dapat mewakili keinginan masyarakat
- b. Masyarakat dengan pembuat keputusan secara bersama-sama mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah diadakan, sehingga akan diperoleh data-data yang dapat dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) yang menjelaskan bahwa di dalam proses partisipasi terdapat tahapan-tahapan yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan
4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi merupakan tahap yang penting, dikarenakan ketika tahap evaluasi dilakukan maka pemerintah beserta masyarakat akan mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program yang di implementasikan dan, kekurangan dan kelebihan dari suatu program tersebut akan di temukan di tahap evaluasi. Masyarakat komunitas suku asli/laut seperti menerima harapan-harapan semata oleh kebijakan atau program pendidikan yang di implementasikan oleh dinas pendidikan dan PKBM Bakti Negri.

Kebijakan atau program yang sudah di sepakati bersama di awal ternyata tidak berjalan dengan maksimal dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat komunitas suku asli/laut Desa Perayun. Adanya masa vakum

proses belajar, ketidakstabilan waktu mengajar membuat masyarakat menjadi kehilangan semangat dalam menempuh pendidikan dari program-program terkhusus untuk program Inklusif.

Partisipasi dalam evaluasi belum terelaksanakan oleh masyarakat komunitas suku asli/laut dikarenakan program yang di implementasikan belum berjalan tuntas dan pemerintah belum melakukan evaluasi terkait program-program yang sudah di implementasikan. Masyarakat komunitas suku asli/laut sejauh ini sangat ikut berpartisipasi dalam setiap tahap yang membutuhkan keikutsertaan mereka di dalamnya.

## **2. Fasilitas dan Aksesibilitas Pendidikan yang Disediakan bagi Masyarakat Komunitas Suku Asli/Laut Desa Perayun Kabupaten Karimun**

Fasilitas atau sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan sangat di butuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Fasilitas yang memadai dapat membuat proses belajar dan mengajar menjadi lebih efisien dan efektif baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan fungsi atau memudahkan suatu usaha. Fasilitas pemerintah maupun swasta yang ada di Indonesia berupa bangunan, klinik, sekolah dan lain sebagainya.

Fasilitas yang memadai di dunia pendidikan dapat menjadi upaya tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dalam kata lain fasilitas yang lengkap tentu memudahkan segala urusan proses belajar mengajar dari pihak pengajar maupun dari pihak yang menerima pelajaran.

Fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat komunitas suku asli/laut untuk menamatkan pendidikan cukup beragam, seperti gedung pendidikan inklusif yang dibangun di tengah pemukiman warga

masyarakat komunitas suku asli/laut. Bangunan pendidikan Inklusif yang dibangun tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan inklusif yakni tertera dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. (PP No.70 Tahun 2009).

Wawancara dengan bapak Khalil, terkait bagaimana awal mula berdirinya gedung inklusif di komunitas suku asli/laut Desa Perayun, dalam wawancara beliau mengatakan:

*"jadi dulu sebelum gedung Inklusif itu dibangun, kita melakukan proses belajar mengajar di rumah warga dirumah bapak alai itu kan, kita menjalankan program keaksaraan dan kesetaraan dari pusat, lalu setelah lama-lama kita belajar dan memang betul-betul kerja, setelah itu dari dinas pendidikan memberikan arahan untuk membuat program inklusif di masyarakat suku asli/laut, ya kebetulan saya ini juga bekerja di dinas pendidikan jadi kita ambil saja kesempatan itu kerjasama antara dinas pendidikan karimun dengan PKBM, lalu kita mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi berupa gedung pendidikan inklusif yang kami beri nama gedung buta aksara dulu, sebelumnya dari provinsi turun kelapangan dulu melihat kinerja kita, jadi bisa dibayangkan adanya muncul gedung itu dulu karena masuknya PKBM juga. Lalu kita melanjutkan lagi proses belajar kita disana, ya Allhamdulillah setelah kita masuk kesana, kita pegang*

*anak-anak disana juga akhirnya mereka mau masuk sekolah balik. Sampai saat ini kita on off itu karena memang kekurangan relawan tenaga pengajar karena ya maklum lah kita ini kan swadaya semua pakai dana pribadi dari PKBM jadi tak sanggup kalau harus membayar gaji guru-guru untuk mengajar di suku laut" (sumber data: wawancara langsung pada tanggal 02 juni 2017)*

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, PKBM Bakti Negeri merupakan jembatan antara masyarakat suku asli/laut dengan pemerintah dalam menempuh pendidikan non formal. Kerja nyata yang dilakukan oleh PKBM Bakti Negeri terhadap pendidikan non formal terhadap masyarakat suku asli/laut mendapat dukungan dari dinas pendidikan kabupaten Karimun dan dengan usaha dan hasil yang memuaskan pada akhirnya di bangun gedung buta aksara oleh pemerintah provinsi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar di gedung buta aksara.

Selain sarana gedung yang di hibahkan oleh pemerintah provinsi untuk masyarakat suku asli/laut, fasilitas-fasilitas selanjutnya yakni berupa kursi, meja, papan tulis, kipas angin, dan lemari buku juga di berikan oleh pemerintah provinsi untuk mendukung sarana pendidikan di masyarakat suku asli/laut. Fasilitas perlengkapan yang ada di dalam gedung dapat dipergunakan sebagai alat untuk menunjang semangat belajar siswa/i, fasilitas yang diberikan menciptakan suasana yang nyaman dalam proses belajar mengajar.

Pemerintah provinsi juga memberikan fasilitas perlengkapan lainnya berupa seragam sekolah, tas, dan sepatu untuk dipakai oleh anak-anak dari masyarakat komunitas suku asli/laut.

Wawancara dengan ibu Meli, terkait dengan fasilitas kelengkapan yang diberikan oleh pemerintah provinsi

*"ada memang yang diberikan itu baju, tas dan sepatu, tapi itu pun tak sesuai dengan badan anak saya adalah itu yang sepatu besar tak muat dengan kaki anak saya,*

*baju nya besar tak muat juga. Saya bilang dengan anak saya, nanti kalau udah besar baru bisa pakai sepatu nya ya. Karna mau tukar dengan tetangga sini mereka juga dapat yang besar-besar jadi memang tak sesuai dengan ukuran badan anak-anak yang disini sepatunya dan bajunya itu”(sumber data: wawancara pada tanggal 02 juni 2017)*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fasilitas perlengkapan berupa baju, tas dan sepatu diberikan tanpa ada ada pendata'an terlebih dahulu terhadap target dari pemberian fasilitas tersebut. Sepatu dan baju tidak dapat dipergunakan langsung oleh anak-anak suku asli/laut yang mendapatkan perlengkapan tersebut dikarenakan ukuran baju dan tas tidak sesuai dengan ukuran badan dari anak-anak suku asli/laut.

Senada dengan ibu sari, dalam wawancara beliau mengatakan :

*“memang ada itu dibagi-bagi baju, sepatu sama tas dikasih sama budak-budak sini tapi mereka bilang sepatu dan baju nya besar-besar jadi tak bisa dipakai sama anak-anak sini kan, tapi ibu tak dapat juga itu sepatu, tas, sama baju nya. Tak paham ibu kenapa anak ibu tak dapat kan, padahal anak ibu rajin terus itu kalau datang belajar. Anak ibu kemarin Cuma dapat uang 20.000 itu dan dapat juga memang alat tulis itu macam buku pensil itu dapat juga anak ibu kalau yang itu”(sumber data: wawancara langsung pada tanggal 03 juni 2017)*

Dari pengakuan Ibu sari mengenai fasilitas yang diterima oleh beliau dapat ketahu bahwa selain dari fasilitas perlengkapan sekolah berupa seragam sekolah, tas dan sepatu yang diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya pendataan sebelumnya terhadap ukuran badan anak-anak suku asli/laut. Selanjutnya diketahui bahwa pemberian fasilitas tersebut juga tidak merata di kalangan anak-anak suku asli/laut, sebagian anak-anak di suku asli/laut ada yang tidak menerima bantuan berupa

perlengkapan sekolah seperti tas, seragam dan sepatu.

Bapak Ardian juga menambahkan bagaimana kepuasan masyarakat suku asli/laut terhadap fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, dalam wawancara beliau mengatakan :

*“yaa untuk fasilitas ya cukup puas lah, karna dikasih gedung terus ada kipas angin nya juga kan di dalam, jadi dipakai jadi tak panas lagi. Tapi ada sedikit bingungnya juga ketika pemberian alat tulis dan perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu dan seragam sekolah itu kok tidak merata kepada anak-anak yang ada disini, sebenarnya itu sistem pendataan mereka seperti apa? Kan kasian kalau ada anak-anak yang dapat dan ada anak-anak yang tidak dapat, mereka bisa berkecil hati yaa mamlumlah namanya juga masih anak-anak tingkat emosional mereka masih belum stabil ada sifat iri itu memang biasa, jadi mungkin kedepannya sih itu kalau memang ingin memberikan ya jangan pilih-pilih, semua lah dapat jadinya merata”*

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa Perayun bapak Heri Santosa, beliau mengatakan :

*“yaa bagaimana setelah yang dilaksanakan sebelum masa kepemimpinan saya dulu sudah merintis juga yaa, sudah disentuh juga dari dana Desa berupa meteran listrik untuk perlengkapan, dan alat tulis sebagai penunjang perlengkapan belajar serta kemarin juga ada dari humas PT. Timah yang ingin membantu kekurangan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat suku asli untuk menunjang pendidikan disana, mereka sudah kelapngan dan bertemu langsung dengan masyarakat suku asli, namun masih belum ada realisasinya sampai sa'at ini, kita masih tetap menunggu itu juga yaa intinya sejauh ini yang bisa diberikan oleh Desa untuk meningkatkan pendidikan di masyarakat suku asli/laut belum terlalu maksimal tapi kita tetap berupaya karna*

*mereka itu tanggung jawab kita bersama juga” (sumber data:wawancara langsung pada tanggal 02 juni 2017)*

Dalam wawancara di atas, dapat dipahami bahwa selain fasilitas gedung untuk tempat belajar dan fasilitas pendukung seperti seragam, sepatu dan tas yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi, ternyata Desa Perayun juga ikut berperan dalam memberikan fasilitas berupa bantuan alat tulis seperti buku, pensil dan penghapus dan bantuan berupa meteran listrik. Fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah provinsi masih belum merata terhadap masyarakat suku asli/laut dikarenakan masih ada anak-anak dari komunitas suku asli/laut yang belum menerima bantuan berupa sepatu, tas dan buku.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintahan Desa sangat di hargai oleh masyarakat komunitas suku asli/laut karena mereka merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa alat tulis dan perlengkapan sekolah yang diberikan untuk meningkatkan kemauan mereka dalam menempuh pendidikan.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat akan lebih puas terhadap pelayanan fasilitas yang diberikan apabila dilakukan pembagian alat tulis dan kelengkapan sekolah secara merata. Tanpa ada unsur diskriminasi dan pilih kasih dalam pemberian bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintahan Desa Perayun.

Disamping itu penulis berharap, ketika pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintahan Desa atau donatur yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat suku asli/laut agar mendata masyarakat suku asli/laut dengan secara langsung turun ke lapangan sehingga mendapat data yang real tanpa adanya manipulasi data dan selanjutnya ketika ingin memberikan bantuan berupa seragam sekolah dan sepatu agar terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap ukuran badan dan size sepatu dari anak-anak suku asli/laut.

Hal tersebut dilakukan agar penyerahan bantuan berupa alat tulis dan perlengkapan sekolah dapat diterima langsung oleh anak yang bersangkutan atau anak yang nama, ukuran baju dan size sepatunya sudah di data terlebih dahulu. sehingga anak-anak suku asli/laut dapat memakai langsung seragam dan sepatu yang diberikan kepada mereka tanpa ada keluhan ukuran baju yang tidak sesuai dengan ukuran badan mereka dan ukuran sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki mereka.

Fasilitas pendidikan memang menjadi alat bantu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menempuh pendidikan, fasilitas pendidikan juga dapat memudahkan seseorang dalam mmenempuh pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai maka proses belajar mengajar yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

## **Penutup**

Partisipasi adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pengambilan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukannya (Talizuduhu dalam Rodliyah 2012:30).

Selanjutnya Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) menjelaskan bahwa di dalam proses partisipasi terdapat tahapan-tahapan yang dibagi menjadi 4 bagian, *Pertama*, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi



dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan maupun tujuan.

*Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dan analisis dari teori Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61-63) bahwa terdapat empat elemen dalam proses partisipasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat suku asli/laut Desa Perayun Kabupaten Karimun sangat berpartisipasi dalam setiap tahap yang dilakukan oleh Dinas pendidikan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Negeri dalam proses penyesuaian program-program pendidikan yang implementasikan di masyarakat komunitas suku asli/laut.

Tingginya partisipasi masyarakat komunitas suku asli/laut dalam memberantas kebodohan, ternyata tidak cukup untuk membuat mereka lepas dari zona buta aksara. Pendidikan yang awalnya berjalan dengan baik, dan proses belajar mengajar yang tidak ada kendala membuat masyarakat komunitas suku asli/laut sangat merespon positive program yang di implementasikan oleh Dinas Pendidikan Karimun dan PKBM dan dengan harapan dapat mengenal huruf serta dapat membaca tulisan sehingga tidak ada perasaan bahwa mereka merasa tertinggal dari

masyarakat Desa Perayun dan masyarakat di sekitar mereka pada umumnya.

Program-program pendidikan dan proses belajar mengajar yang telah berjalan dari tahun 2013, mengalami masa vakum dari proses belajar mengajar dikarenakan kondisi waktu yang tidak efektif dan tidak stabil selama hampir satu tahun, hal berikut akhirnya membuat masyarakat komunitas suku asli/laut Desa Perayun merasa kecewa karena menganggap bahwa mereka hanya diberi harapan-harapan yang tidak ada buktinya.

Masa vakum dari proses belajar mengajar bersama masyarakat komunitas suku asli/laut dikarenakan dua alasan yang *pertama*, kurangnya relawan yang menjadi tenaga pengajar di gedung Inklusif atau gedung buta aksara yang berdiri di tengah pemukiman masyarakat komunitas suku asli/laut Desa Perayun. *Kedua*, waktu yang tidak kondusif dan tidak stabil menyebabkan kehadiran masyarakat komunitas suku asli/laut menjadi berkurang dikarenakan mereka sudah terlebih dahulu pergi untuk bekerja ketika guru (dibawa Ibu Resti) datang untuk mengajar, hal seperti ini terus terjadi berulang-ulang sehingga penulis beranggapan ada faktor kejenuhan antara pihak tenaga pengajar dan pihak warga komunitas suku asli/laut.

Fasilitas dan aksesibilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintahan Desa Perayun di anggap cukup memuaskan namun dengan catatan tertentu yakni pemberian fasilitas alat tulis dan perlengkapan sekolah diberikan harus secara merata tanpa ada nya pilih bulu dan dilakukan pendata'an yang secara real atau data sebenar-benarnya oleh masyarakat suku asli/laut karena penulis menganggap bahwa seluruh masyarakat komunitas suku asli/laut sangat membutuhkan bantuan tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

Buku – Buku

Abdullah, Saandy.(2013)..Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka

- Kreditnya. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiarjo, Miriam (2003). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga
- Marjuki Saleh (2012). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moeleong J Lexy (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Suwarno. (2013). *Menggugat Partisipasi Publik dalam pemerintah Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing
- Rodliyah. (2012). *Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan disekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ross, Muray G., and B.W. Lippin. (1967). *community Organization*. New York: Harper & Row Publisher
- Saroni Muhammad. 2012. "Pendidikan Untuk Orang Miskin". Depok: AR-Ruzz Media
- Siswanto Sunarno, 2005. "Hukum Pemerintahan Daerah". Makasar: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2010. "Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Range dan Determinan". Bandung: Alfabeta
- Tandjung, Salman Husin. 2003. "Sistem Pemerintahan Desa". Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Zulkarnain Nasution. 2009. "Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi". Malang: UMM Press

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomer 32 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No 72 Tentang Desa.

#### A. Dokumen

- Monografi Desa Perayun Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

#### Jurnal

- Desi Firnanda, 2012. *Partisipasi masyarakat dalam penerapan e-KTP studi pada Kecamatan Bukit Bestari*
- Hiryanto, 2009. *Efektivitas Program Pemberantasan Buta Aksara Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY*
- Khidir Marsanto Prawirosusanto, 2014. *Menerima 'Kepengaturan' Negara, Membayangkan Kemakmuran: Etnografi Tentang Pemukiman dan Perubahan Sosial Orang Suku Laut di Pulau Bertam, Kepulauan Riau*
- Marsus suti, 2011. *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. Universitas Negri Makasar*
- Novi Winarti, 2013. *Menguak Kegagalan Implementasi Kebijakan Pendidikan: Studi Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Masyarakat Suku Laut di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*